

## ABSTRAK

Vania Dwitiya Cahyani. 2019. PELANGGARAN AD/ART SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 375 K/PDT.SUS-PARPOL/2017). Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai pelanggaran AD/ART dalam perselisihan internal partai politik sebagai perbuatan melawan hukum dan sebagai kompetensi peradilan umum serta alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-Parpol/2017.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus (*case study*). Jenis dan sumber bahan hukumnya yakni sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka.

Pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Tergugat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat melakukan pelanggaran Pasal 12 Ayat (5) Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2011 dan Pasal 14 Ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 yakni tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai Nomor 62/DPP-PHPU/2014 merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkara perselisihan internal partai politik tersebut dapat diselesaikan di Peradilan Umum sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dan dalam pertimbangan putusan telah memenuhi asas kepastian hukum.

**Kata Kunci: Pelanggaran AD/ART, Perbuatan Melawan Hukum, dan Pertimbangan Hakim**

## **ABSTRACT**

*Vania Dwitiya Cahyani. 2019. VIOLATION OF AD / ART AS AN ACTION AGAINST THE LAW IN THE INTERNAL DISPUTE OF POLITICAL PARTY (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER: 375 K / PDT.SUS-PARPOL / 2017). Legal Writing (Final Project) Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.*

*This study described and examined the problems about violation AD/ART as Acts Against Law and competence of General Justice and the reason of Supreme Court to accept appeal request on Judges of The Supreme Court Number 375 K/Pdt.Sus-Parpol/2017.*

*The author in this study used normative legal research through descriptive by using a qualitative approach with case study. The types and sources of legal material are primary and secondary legal materials through literature study as the legal collection techniques.*

*This research reveals that the Central Council of Democratic Party's did an offense of article 12 paragraph (5) Ethics Code of Democratic Party in 2011 and Article 14 paragraph (2) point a about Bylaws of Democratic Party in 2015 namely not implementing the decision of the Party Court Number 62 / DPP-PHPU / 2014 was an act against the Law because it had been proven to fulfill the elements contained in Article 1365 of the Civil Code and cases of internal political disputes can be solved in the General Court in accordance with Article 33 Paragraph (1) of the Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. The Supreme Court granted grant a request for cassation because of The Defendant as been proven to have Acts Against Law and in in consideration of the decision has fulfilled the principle of legal certainty.*

***Keywords: Violation of AD/ART, Acts Against Law, and Judge Considerations***